

EVALUASI PROGRAM NASIONAL UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (UPSUS SIWAB) DI KOTA TANJUNGPINANG

¹⁾SRI AMBAR RINAH

²⁾DIAH SITI UTARI

³⁾NUR MARLINA

¹⁾ Dosen Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji

²⁾ Dosen Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji

³⁾ Mahasiswa Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji

Email: sriambarrinahok@gmail.com

ABSTRACT

The State of Indonesia is an agrarian country, which mostly seeks as farmers and ranchers. However, Indonesia has not been able to meet the needs of beef for the community. Though demand for beef continues to increase from time to time in line with increasing population growth. Therefore, to overcome this problem, the government made a national program that is a special effort for pregnant cattle breeders (Upsus Siwab), which is stated in Minister of Agriculture Regulation No. 48 / Permentan / PK.210 / 10/2016 concerning special efforts to accelerate the increase pregnant cattle and buffalo populations. For the city of Tanjungpinang, the national program Upsus Siwab focuses more on the target of increasing population through artificial insemination.

This study aims to determine the process and results of the implementation of the national program for the special effort of mandatory breeding cattle (Upsus Siwab) in the city of Tanjungpinang, using the CIPP evaluation model proposed by Stufflebeam and Shinkfield. This type of research is exploratory with a qualitative approach. Then the techniques and data collection tools are carried out by means of observation, interviews, and documentation. The research locations in the Department of Agriculture and Fisheries and five groups of fostered cattle from the Department of Agriculture and Fisheries of Tanjungpinang city are one of the target groups of the program.

The results of the study indicate that the national program of Upsus Siwab in Tanjungpinang City has been implemented well, but with existing limitations. Because the components of the availability of facilities and infrastructure, namely facilities and budget are still inadequate. So there are still many obstacles that must be faced. The suggestions that the author can convey so that the policy implementers do a comprehensive outreach to groups and individual breeders in the city of Tanjungpinang. As well as the Tanjung Pinang city government to allocate a special budget for animal husbandry development in the city of Tanjungpinang, this is so that the implementation of the Upsus Siwab national program will continue without any limited facilities and infrastructure.

Keywords: *Evaluation, National Programs Of Special Efforts For Parent Cives Mandatory Pregnant*

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan peternak. Akan tetapi Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daging sapi bagi masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu seiring meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membuat sebuah program

nasional yaitu upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab), yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting. Program ini mencakup dua program utama, yaitu peningkatan populasi melalui inseminasi buatan (IB) dan intensifikasi kawin alam (INKA). Untuk kota Tanjungpinang, program nasional Upsus Siwab lebih berfokus pada target peningkatan populasi melalui inseminasi buatan (IB).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di Kota Tanjungpinang, dengan menggunakan model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield. Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan serta lima kelompok ternak sapi binaan dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan kota Tanjungpinang yang menjadi salah satu kelompok sasaran program.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program nasional Upsus Siwab di kota Tanjungpinang sudah dilaksanakan dengan baik, namun dengan keterbatasan yang ada. Sebab pada komponen ketersediaan sarana dan prasarana yaitu fasilitas dan anggaran masih kurang memadai. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar para pelaksana kebijakan melakukan penyuluhan secara menyeluruh ke kelompok maupun peternak individu yang ada di kota Tanjungpinang. Serta pihak pemerintah kota Tanjungpinang untuk mengalokasikan anggaran khusus pengembangan peternakan di kota Tanjungpinang, hal ini agar pelaksanaan program nasional Upsus Siwab tetap berjalan tanpa adanya keterbatasan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab)

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani dan peternak. Sehingga dalam hal ini, seharusnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat, salah satunya berupa kebutuhan daging sapi dari sektor peternakan. Namun kenyataannya negara Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daging sapi bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi bagi masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam cara, seperti melakukan kebijakan impor daging sapi dari negara Australia dan lainnya, kemudian membuat sebuah program Swasembada daging sapi yang sudah dicanangkan sejak tahun 2005 dan ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2010, namun masih tetap tidak berhasil dalam memenuhi kebutuhan daging sapi bagi masyarakat di Indonesia hingga saat ini. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan demi memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat, maka

pemerintah mengeluarkan program nasional yaitu upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab). Program ini mencakup dua program utama, yaitu peningkatan populasi melalui inseminasi buatan (IB) dan intensifikasi kawin alam (INKA). Untuk kota Tanjungpinang, program nasional Upsus Siwab lebih berfokus pada target peningkatan populasi melalui inseminasi buatan (IB). Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani/semen sapi jantan ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi. dalam Peraturan Menteri Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting pasal 12, Pelayanan IB dilakukan melalui:

- a. penyediaan bahan dan sarana IB
- b. peningkatan jumlah dan kompetensi teknisi IB, dan
- c. pemeriksaan kebuntingan hasil IB

Namun, program ini mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu kelancaran kegiatan UPSUS SIWAB, serta kegiatan inseminasi yang tidak terjadwal, menyebabkan petugas lapangan turun ke lapangan tidak serentak.

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di Kota Tanjungpinang. Keberhasilan program ini penting untuk dievaluasi, agar kedepan pemerintah Indonesia bisa menentukan langkah selanjutnya dalam meningkatkan kemampuan swasembada pangan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dikutip dari Farida Yusuf Tayipnaps, 2008:9 dalam Sri Ambar Rinah: 2020, "Evaluasi suatu program juga diartikan mengumpulkan informasi tentang bagaimana program itu berjalan, tentang dampak yang mungkin terjadi atau untuk menjawab pertanyaan yang diajukan." (Sri Ambar Rinah, 2020)

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu kajian dalam ilmu administrasi publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan administrasi publik. Secara umum, istilah "*kebijakan*"

atau “*policy*” digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu kegiatan bidang tertentu. Menurut Thomas Dye (Subarsono, 2005:2), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Nugroho (2014: 36-37), menyatakan bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis yang terdapat dalam proses kebijakan publik tersebut terdiri atas:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Adopsi kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih salah satu alternatif kebijakan terbaik kemudian diadopsi dengan dukungan dari legislatif dan lembaga lainnya.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Dan menurut Mustopadidjaja (Tachjan, 2006:21), pada garis besarnya siklus kebijakan tersebut terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu (1) perumusan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, dan (3) pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan. Jadi dilihat dari prosesnya, efektivitas kebijakan publik akan ditentukan atau dipengaruhi oleh proses perumusana kebijakan, implementasi kebijakan, dan proses evaluasinya. Ketiga tahapan kebijakan tersebut memiliki hubungan kausal atau saling berkaitan satu sama lain.

Evaluasi Program

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program (Wirawan, 2011:17) evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*Proces Evaluation*), evaluasi manfaat (*Outcome Evaluation*), dan Evaluasi Akibat (*Impact Evalutioan*). Dalam hal ini, evaluasi proses meneliti dan menilai apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani, evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program.

Stufflebeam (Tayibnapi 2008: 14) merumuskan bahwa evaluasi sebagai “Suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan”. Stufflebeam merumuskan model evaluasi CIPP, yang membagi evaluasi menjadi 4 macam, (Wirawan, 2011: 92) :

- a. *Context Evaluation to Serve Planning Decision*
Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.
- b. *Input Evaluation, Structuring Decision*
Evaluasi ini menolong, mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
- c. *Process Evaluation, to Serve Implementing Decision*
Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki.
- d. *Product Evaluation, to Serve Recycling Decision*
Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan?

Ada beberapa model evaluasi salah satunya yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program ialah Model Evaluasi Sistem Analisis (*System Analys Evaluation Model*) yang dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy (Wirawan, 2011:107) atau yang sering

disebut Management Evaluation Model. Dalam evaluasi ini memiliki 5 indikator diantaranya, yaitu :

1. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)
Evaluasi masukan dalam hal ini berkaitan untuk menjangkau dan menganalisis serta menilai kuantitas dan kualitas masukan yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan suatu program bantuan, sumber-sumber yang diperlukan oleh program diantaranya tenaga, keuangan dan sumber-sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan program untuk merancang dan melaksanakan program.
2. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)
Pada tahap evaluasi proses memfokuskan kepada pelaksanaan program yang telah dirancang guna menghasilkan suatu hasil akhir serta yang akan mempengaruhi *impact* (dampak) yang dihasilkan dari suatu program bantuan.
3. Evaluasi Keluaran (*Output Evaluation*)
Keluaran program merupakan produk langsung dari aktivitas program yang dapat berupa target jenis dan level layanan yang harus disajikan oleh program.
4. Evaluasi Akibat/Pengaruh (*Outcome Evaluation*)
Evaluasi akibat/pengaruh adalah perubahan khusus perilaku, pengetahuan, keterampilan, status dan level berfungsinya para partisipan program yang mendapatkan layanan/intervensi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Suryani dan Hendryadi (2015:108), penelitian eksploratif merupakan penelitian dimana peneliti berupaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena dalam sebuah situasi. Adapun yang menjadi daerah atau lokasi penelitian ini adalah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, yang mana Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang merupakan Tim Pelaksana Administratif dan kelompok kerja Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam menyelenggarakan kegiatan program upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di Kota Tanjungpinang. subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang yang berjumlah 34 orang pegawai, 3 petugas inseminator, 2 petugas

PKb (pemeriksa kebuntingan) dan 5 kelompok ternak sapi binaan dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang yang berjumlah 32 anggota. Dalam penelitian ini, teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang digunakan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi (Pasolong, 2013:107). Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa datanya adalah menggunakan teknik kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) di Kota Tanjungpinang

1. Evaluasi proses pelaksanaan program nasional Upsus Siwab di Kota Tanjungpinang

Untuk melihat evaluasi proses pelaksanaan program nasional Upsus Siwab di kota Tanjungpinang, maka dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut :

a. Penyampaian informasi dalam pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang

Pada dimensi penyampaian informasi dalam pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang, dapat dilihat melalui kejelasan informasi dan konsistensi para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

1) Kejelasan Informasi

Dari hasil wawancara dan observasi di atas terkait indikator kejelasan informasi dalam pelaksanaan program nasional Upsus Siwab, dapat dianalisis bahwa kejelasan informasi dilaksanakan melalui penyampaian secara sosialisasi baik secara langsung di kelompok ternak maupun tidak langsung melalui *banner*. Adapun materi-materi yang dijelaskan berkaitan dengan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting

(Upsus Siwab), serta disampaikan secara jelas tentang syarat dan waktu pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan secara jempot bola yaitu kelompok ternak melapor terlebih dahulu kepada petugas inseminator atau petugas lapangan, kemudian petugas akan datang untuk melaksanakan program. Namun pelaksanaannya tidak secara serentak dan terjadwal seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang upaya percepatan sapi dan kerbau bunting.

2) Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, terkait indikator konsistensi dalam pelaksanaan program nasional Upsus Siwab, dapat dianalisis bahwa pihak implementor yaitu Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan kota Tanjungpinang khususnya di bidang peternakan dan petugas inseminator dan pemeriksa kebuntingan (PKb) telah melaksanakan program berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting. Namun petugas inseminator dan pemeriksa kebuntingan (PKb) hanya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya saja, untuk pelaksanaannya tidak secara serentak dan terjadwal. Sehingga belum konsistensi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016.

b. Kesesuaian prosedur pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang

Pada dimensi kesesuaian prosedur pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang, dapat dilihat melalui dua indikator yaitu sebagai berikut :

1) SOP (*Standar Operating Procedure*)

Berdasarkan hasil wawancara dan bagan tentang SOP dalam pelaksanaan program nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus

Siwab) di Kota Tanjungpinang dapat dianalisis bahwa pihak pelaksana yaitu Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan kota Tanjungpinang beserta petugas inseminator dan pemeriksa kebuntingan (PKb) melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan SOP yang berlaku, namun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

2) Wewenang

Dari hasil wawancara dan observasi di atas terkait indikator wewenang dalam pelaksanaan program nasional Upsus Siwab, dapat dianalisis bahwa pihak implementor yaitu Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan kota Tanjungpinang, beserta petugas inseminator dan pemeriksa kebuntingan (PKb) telah menjalankan beberapa wewenangnya dalam pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau bunting dan pedoman pelaksanaan program Upsus Siwab. Salah satunya mengirimkan petugas inseminator dan PKb untuk mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi petugas.

c. Pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang

Sumber daya pelaksana yang terlibat dalam program nasional upsus siwab di kota Tanjungpinang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program, karena tanpa pelaksana yang terlibat, program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui indikator para pelaksana, sebagai berikut :

1) Staf

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat di analisis bahwa staf atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) telah mencukupi, memadai dan berkompeten. Hal ini terbukti berdasarkan kemampuan dan

keahlian yang dimiliki oleh petugas di bangku SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) peternakan dan adanya sertifikat yang dimiliki oleh implementor yaitu petugas inseminator dan pemeriksa kebuntingan (PKb) setelah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, kelompok sasaran dan kelompok ternak sapi yang juga telah memiliki pengalaman beternak baik dari kampung halaman maupun pelatihan yang pernah diberikan oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan kota Tanjungpinang.

2) Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa fragmentasi atau hubungan kerja antara instansi terkait pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang yaitu Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang tidak bekerja sendiri, tetapi berkoordinasi dengan BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, hal ini karena program Upsus Siwab merupakan program nasional yang diselenggarakan di 33 provinsi dan tersebar di beberapa daerah kabupaten/kota. Sehingga membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu untuk mendukung program nasional Upsus Siwab di kota Tanjungpinang, pihak dinas Pertanian Pangan dan Perikanan kota Tanjungpinang juga bekerjasama dengan salah satu Bank, yang bertujuan untuk membantu kelompok ternak sapi dalam hal pemberian asuransi.

d. Ketersediaan sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal

1) Fasilitas

Dari hasil wawancara dan observasi terkait indikator fasilitas dalam pelaksanaan program nasional Upsus Siwab di kota Tanjungpinang, dapat dianalisis bahwa fasilitas yang tersedia yang digunakan dalam pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab)

di kota Tanjungpinang belum mencukupi. Pihak Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan kota Tanjungpinang hanya memiliki beberapa sarana-prasarana yaitu :

- a. Alat-alat penunjang inseminasi buatan (IB) (Container dan Gun IB),
- b. Penyediaansemen beku dan nitrogen (N₂) cair
- c. Ketersediaan air dan
- d. Kendaraan dinas
- e. Sapi dan kandang sapi

Sedangkan untuk penyediaan pakan konsentrat, hanya sekali diberikan di awal tahun pelaksanaan program dan tahun berikutnya tidak diberikan lagi.

2) Anggaran

Dari hasil wawancara dan observasi di atas terkait indikator anggaran dalam pelaksanaan program nasional Upsus Siwab di kota Tanjungpinang, dapat dianalisis bahwa anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik bersumber dari APBN dan APBD dalam pelaksanaan program nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang sudah digunakan sesuai dengan peraturan dan pedoman dalam pelaksanaan program nasional Upsus Siwab, baik digunakan untuk sarana dan prasarana program, biaya operasional petugas, sosialisasi/penyuluhan program dan kendaraan operasional. Sedangkan untuk kelompok ternak sapi tidak ada anggaran yang diberikan dan hanya berupa fasilitas dari pemerintah dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan kota Tanjungpinang

e. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, untuk dimensi hambatan-hambatan pada pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang, dapat dianalisis bahwa dalam mewujudkan tujuan dari program nasional Upsus Siwab di kota Tanjungpinang tidak mudah, masih adanya kendala-kendala yang harus di hadapi oleh pihak implementor dan kelompok sasaran, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk membantu kelompok peternak dalam menyiapkan kebutuhan pakan ternak (konsentrat).

2. Evaluasi hasil pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang

Evaluasi produk atau hasil dari pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang, yang dimana dapat dilihat dari dua indikator, antara lain sebagai berikut :

a. Pencapaian tujuan pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada indikator pencapaian tujuan dari pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) untuk kota Tanjungpinang belum mampu mencapai tujuan dari pelaksanaan program nasional Upsus Siwab, yaitu untuk meningkatkan jumlah populasi ternak sapi di kota Tanjungpinang yang belum dapat tercapai.

b. Dampak pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) yang dirasakan kelompok ternak sapi di kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait indicator membantu peningkatan perekonomian pada kelompok ternak sapi di kota Tanjungpinang,

bahwa dengan adanya program nasional upsus siwab ini nyatanya membantu kelompok peternak sapi dari segi perekonomian, yaitu berupa penjualan sapi yang berasal dari kelahiran anak sapi melalui proses kawin suntik atau inseminasi buatan (IB).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di kota Tanjungpinang telah berjalan dengan baik, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Hal ini karena kota Tanjungpinang hanya ikut meyukseskan program dan bukan merupakan daerah sasaran utama dari Kementerian Pertanian. Sehingga kota Tanjungpinang belum dapat mencapai target dan tujuan dari program nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab), dalam upaya meningkatkan populasi sapi di kota Tanjungpinang.

Saran

1. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi lebih lanjut mengenai program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) kepada seluruh kelompok ternak maupun peternak yang ada di kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah kota Tanjungpinang, untuk memberikan anggaran khusus pengembangan peternakan di kota Tanjungpinang. Agar dalam implementasi program peternakan, salah satunya program nasional upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di Kota Tanjungpinangmampu berjalan dengan baik, tanpa adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, seperti semen beku dan nitrogen (N₂) cair untuk inseminasi buatan (IB), hijauan pakan ternak (HPT), pakan konsentrat, pos inseminasi buatan (IB) untuk pos petugas inseminator dan pemeriksa kebuntingan (PKb), serta alat ultrasonografi untuk pemeriksaan status reproduksi.
3. Bagi kelompok sasaran yaitu kelompok ternak yang telah dibentuk oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan kota Tanjungpinang untuk tetap fokus, saling bekerjasama, dan pantang menyerah dalam mengembangkan kelompok ternak

sapi. Hal ini agar kelompok ternak sapi terus berkembang dan mampu meningkatkan jumlah populasi sapi yang ada di kota Tanjungpinang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, H. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alvabeta.

Rinah, S. A. (2020). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Bina Keluarga Balita di RW X Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur). *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 2(1), 314-329.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suryani, Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasinya pada Penelitian Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta : prenadamedia group.

Tachan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.

Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

DOKUMEN :

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/PK.210/2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting